

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, HR, dan Adri Desasfuryanto.2012. Sistem Peradilan Pidana. PTIK. Jakarta.
- Abidin Farid, Zainal. 2007. *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Ali, Achmad. 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Jurisprudence)*. Termasuk Interpretasi Undang-Undang (*Legisprudence*). Kencana. Jakarta.
- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Toko Gunung Agung. Jakarta.
- Ali, Achmad. 2004. *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*. BP Ibal. Jakarta.
- Ali, M.Hatta. 2012. *Peradilan Sederhana, Cepat, & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*. PT Alumni. Bandung.
- Arief, Barda Nawawi. 2007. *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Asshidique, Jimly. 2005. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press.Jakarta.
- Atmasasita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisisionisme*. Bina Cipta. Bandung.
- Atmasasmita, Romli. 2007. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Putra Bardin. Jakarta.
- Apeldoorn, Van. 1990. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Pradnya Paramita.
- Bemmelen, Van, *Lerboek van Het Nederland Strafprocesrecht*, 6e Herziene Druk
- Buana, Mirza Satria. 2010. *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi*.

Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

Budiman, Arief. 1999. *Teori Negara : Negara Kekuasaan dan Ideologi*, Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.

Chazawi, Adami. 2010. *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana (Penegakan hukum dalam Penyimpangan Praktik dan peradilan Sesat)*. Sinar Grafika, Jakarta.

Convey Alan, Edward Eldefonso & Walter Hartinger. 1982. *An Introduction to the criminal Justice System and Process*. Prentice Hall. New Jersey.

Daulay, Ikhsan Rosyda Parluhutan. 2007. *Mahkamah Konstitusi (Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia)*. Rineka Cipta. Jakarta.

Faal, M. 1991. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Pradnya Paramita. Jakarta.

Fadjar, A. Mukhtie. 2005. *Tipe Negara Hukum*. Bayumedia Publishing. Malang.

Fuady, Munir. 2010. *Dinamika Teori Hukum*. Bogor, Ghalia Indah. Indonesia.

Fuady, Munir. 2013. *Teori-teori besar (Grand Theory) dalam hukum. Kencana. Jakarta.*

Gautama, Sudargo. 1983. *Pengertian Tentang Negara Hukum*. Alumni. Bandung.

Halim, A. Ridwan. 1987. *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Hamzah, Andi dan Irfan Dahlan. 1987. *Upaya Hukum dalam perkara pidana*. Bina Aksara. Jakarta.

Hamzah Andi, 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.

Andi Hamzah, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta. Jakarta.

Hamzah, Andi. dan RM Surachman. 2015. *Pre Trial Justice Discretionary Justice dalam KUHAP Berbagai Negara*, Sinar Grafika. Jakarta.

- Harahap, M. Yahya. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali)*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hart, H.L.A.1972. *The Concept Of Law*. Oxford University Press. London.
- Huijbers, Theo.1982. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Kanisius. Jakarta.
- Ibrahim, Johny. 2006.*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Edisi Revisi, Cetakan Kedua. Bayumedia Publishing. Malang.
- Ilmar, Aminuddin. 2016. *Konstruksi Teori*. University Pers. Hasanuddin.
- Ismail, Fauzie Kamal. 2011. *Tesis berjudul Kepastian Hukum Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. Depok.
- Jurdi, Fajlurrahman. 2016, *Teori Negara Hukum*. Setara Pers. Malang.
- Kaligis,O.C. 2006. *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, PT Alumni. Bandung.
- Loeby Loqman, 2002. *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Acara Pidana*. Datacom. Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud.2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta.
- M.Freidman, Lawrence, *American Law*. 1984. Norton and Company. New York. WW.
- M.Freidman, Lawrence, 2001, *American Law an introduction* (Hukum amerika sebuah pengantar) diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, PT Tata Nusa. Jakarta.
- M Hardjon, Philipus. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip, penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Bina Ilmu. Surabaya.
- Michael Carvadino, Dignan James. 1997. *The Penal Sistem An Introduction*, Sage Publication Ltd. New York.
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Penemuan Hukum*. Liberty. Yogyakarta.

- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Muhamad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Muhammad, Rusli. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. UII Press. Yogyakarta.
- Mutiara Nelson. Febby.2020 *Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia*. Rajawali Pers. Depok,
- Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin. 2009. *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Putra Media Nusantara. Surabaya.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Najih, Mokhammad.2014. *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*. Setara Press. Malang.
- Prasetyo, Teguh. dan Abdul Halim Barkatullah. 2014. *Filsafat, teori, & Ilmu Hukum Pemikiran: Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Poernomo, Bambang. 2005. *Pole Dasar, Teori Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*. Liberty. Yogyakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1980. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung. Bandung.
- Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI. 2012. *Peninjauan Kembali Putusan Pidana Oleh Jaksa Penuntut Umum (Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan)*. Penerbit Balitbang Pendidikan dan pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. Jakarta.
- Rahardjo, Sajipto. 2012. *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Reksodiputro, Mardjono. 1997. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kelima, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi). Jakarta Universitas Indonesia.

- Reksodiputro, Mardjono. 2007. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem peradilan Pidana*. Ed. 1. Cet. 3. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI. Jakarta.
- Ranoemihardja R. Atang. 1981. *Hukum Acara Pidana*. Tarsito. Bandung.
- Santoso, Agus Hukum. 2012, *Moral & Keadilan (Sebuah Kajian Filsafat Hukum)*, Kencana. Jakarta.
- Sayuna, Inche. *Tesis Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Surakarta, Universitas Sebelas Maret.
- Setiadi, Edi dan Kristian. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Kencana. Jakarta.
- Septiana Nurbani dan Erlies dan Salim. 2014. *Buku Kedua, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Rajagrafindo. Jakarta.
- Siahaan, Maruar. 2011. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Konstitusi Press. Jakarta.
- Sidharta, Arief. 2006. *Karakteristik Penalaran hukum dalam Konteks Keindonesiaan*. Jakarta. Cv Otomo.
- Sidharta, Arief. 2010. *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim : Antara Keadilan, kepastian Hukum dan Kemanfaatan*. Komisi Yudisial Republik Indonesia. Jakarta.
- Sitanggang Djernih. 2018. *Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati*, Pustaka Reka Cipta. Jakarta.
- Soemantri, Sri. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Alumni. Bandung. 1992.
- Soeparman, Parman. 2007. *Pengaturan Hak Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*. PT Refika Aditama. Bandung.

- Suhartono.2011. Tesis Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (*Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara Yang Efisien, Efektif Dan Akuntabel*). Jakarta. Universitas Indonesia.
- Sunaryo, Sidik. 2005. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. UMM Press. Malang.
- Sutarto, Suryono. 2004. *Hukum Acara Pidana*. Jilid II. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Syahrani, Riduan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta.
- Soedirjo. 1986. *Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Arti dan Makna*. Akademika Pressindo. Jakarta.
- Soemantri, Sri. 1992.*Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Alumni.Bandung.
- Sugeng Rukmono, Bambang. 2018. Kebijakan Pemidanaan Dan Perlindungan Hukum Atas Lambannya Pelaksanaan Hukuman Mati. Cet. I. UNS Pers. Surakarta.
- Sugeng Rukmono, Bambang. 2016. *Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Cet. I. PT Rajagrafindo Persada. Depok.
- Sugeng Rukmono, Bambang. 2018. *Perlindungan Hak Asasi Manusia Atas Lambannya Eksekusi Hukuman Mati*. Cet. I. UNS Pers.Surakarta.
- Swantoro Heri, 2017. *Harmonisasi Keadilan dan Kepastian dalam Peninjauan Kembali*. Kencana. Depok.
- Tahir, Hadari Djenawi. 1983. Pembahasan tentang Upaya Hukum Banding,Kasasi dan Peninjauan Kembali, Penerbit Pustaka Dian. Jakarta.
- Tahir, Heri.2010. *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Laksbang Pressindo. Yogyakarta.

- TIM FH-UI. 2001. *Sinkronisasi Ketentuan Perundang-undangan Mengenai Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Penerapan Asas-Asas Umum*. UI. Jakarta.
- Utrecht, E. 1961. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Balai Buku Ichtiar Baru. Jakarta.
- Wajono, Padmo. 1983. *Indonesia adalah negara berdasar atas hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Warassih, Esmi. 2011. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. UNDIP. Semarang.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2002. *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Elsam & Huma. Jakarta.
- Waluyo, Bambang. 2016. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Ziauddin, Sardar. 1996. *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Mizan. Bandung.

ARTIKEL DAN KARYA ILMIAH

- Anomius, Pengarahan Ketua Mahkamah Agung RI pada Rapat Kerja Departemen Kehakiman RI tahun anggaran 1996/1997 pada tanggal 5 Agustus 1967 di Jakarta.
- Ays Suyuti, *Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan*, diakses melalui <http://repository.ac.id>
- Bello, Petrus CKL. *Hubungan Hukum dan Moral*. Ringkasan Tesis Program Pasca Sarjana STF Driyarkara Jakarta.
- Baiquni Ahmad, *Ini Catatan Hitam Gembong Narkoba Freddy Budiman*, Jumat, 29 Juli 2016, diakses melalui www.dream.co.id/news/ini-catatan-sepak-terjang-gembong-narkoba-freddy-budiman
- Cakim, M.Lutfi. *Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konsitusi. Volume 2 No. 2. tahun 2015.
- Djoko Sarwoko. *Penundaan eksekusi hukuman mati diduga disengaja*. [www.beritasatu.com /nasional/116840/penundaan-eksekusi-hukuman-mati-diduga-disengaja](http://www.beritasatu.com/nasional/116840/penundaan-eksekusi-hukuman-mati-diduga-disengaja). diakses pada tanggal 14 Juli 2020

Dudu Duswara Machmudin, *Optimalisasi Peran Hakim Agung dalam Penyelesaian Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali*, *Jurnal Konstitusi* Volume 12, Nomor 2 Juni 2015,

Elu, Steve. *Hukum dalam perspektif Austin dan Hart*, diakses melalui www.kompasiana.com pada tanggal 21 Juli 2021.

Freedy Budiman, diakses melalui Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas tanggal 8 September 2021

Harsanto, Adi, dkk. *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. *Jurnal katalogies* volume 5 nomor 3. Maret 2017.

Harkrisnowo, Harkristuti. 2002. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Newsletter Komisi Hukum Nasional : Jakarta.

Harkrisnowo, Harkristuti. 24-25 Juni 2003. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Peran Akademis, Makalah pada Forum Dengar Pendapat Publik ; Pembaruan Kejaksaan*, diselenggarakan oleh KHN, Kejaksaan Agung, dan Patnrnership for Governance Reform in Indonesia : Jakarta.

ICCPR dan General Comment No. 32 butir 35. hal,22 Dalam Leip dan NLRP, *Pembatasan Perkara*, Jakarta: Leip dan NLRP, 2010,

Kirina Jason Sembiring, Eidi, *Sepak Terjang Freddy Budiman*, Jumat, 29 Juli 2016 diakses dari www.sindonews.com)

Kalo, Syafrudin. *Penegakan hukum yang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat : suatu sumbangan pemikiran*, Makalah, www.hunterscience.weebly.com diakses pada tanggal 8 Agustus 2018

Leip dan NLRP. 2010. *Pembatasan Perkara*, Leip dan NLRP : Jakarta.

M. Wantu, Fence. *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*. *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*. Vol. 19 No.3 Oktober 2007, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Mimbarhukum.com, *Pendapat tokoh-tokoh aliran teori hukum alam tentang negara dan hukum - Legal Smart and Solutions* tanggal 24 Juli 2019. diakses pada tanggal 10 Agustus 2021

Soeroso, Fajar Laksono. 2013. *Pembangkangan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 3 Desember 2013

Suhariyanto, Budi. *Aspek Hukum Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali Dalam Perkara Pidana*, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Volume 4, Nomor 2 Juli 2015 : 335-350, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Peradilan MA-RI,

Sumardjono Maria S.W., *"Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan dan Properti"*, "Makalah disampaikan dalam seminar kebijaksanaan baru di bidang pertanahan, dampak dan peluang bagi bisnis properti dan perbankan", Jakarta, 6 Agustus 1997.

University of Leicester. 1998. Modul 5. *Issues In The Criminal Justice Process*, Scarman Center.

Wijayanta, Tata. *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2 Mei 2014.

Yuniagara, Riki, dkk, *Kekuatan Hukum Mengikat Sema No. 7 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 19, No. 1, (April, 2017).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. LN No. 76 tahun 1981 TLN No. 3209.

Undang-Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, LN No. 67 Tahun 2004 TLN No.. 4401.

Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, LN Tahun 2009 TLN No.5076 .

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2005 tentang Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 16/PUU-VIII/2010 tanggal 15 Desember 2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : No. 23/PUU-V/2007 tanggal 14 Januari 2008.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 33/PUU-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 34/PUU-XI/2013 tgl 6 Maret 2016

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 64/PUU-VIII/2010 tgl 28 Pebruari 2011

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 30 oktober 2007

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-X/2012 tanggal 18 Juli 2012

Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 1969 tentang peninjauan kembali.

Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 1980 tentang peninjauan kembali.

Surat Edaran Mahkamah Agung No.7 tahun 2014 tentang pengajuan permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana.

Surat Edaran Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di tingkat pengadilan pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia

Departemen Kehakiman, *Pedoman pelaksanaan KUHP*, Cet 4, Jakarta : Yayasan Pengayoman, , 1983.

Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II Edisi 2007, Mahkamah AGung RI Jakarta,2008

RUU KUHP tanggal 25 Pebruari 2015

RUU KUHP

SUMBER LAINNYA

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Kamus besar bahasa Indonesia daring www.kbbi.kemdikbud.go.id ,

Komentar Umum Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik

Laporan Tahunan 2020 Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Rekapitulasi Terpidana mati Direktorat Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda (Oharda) tahun 2020, Sunprognil Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.

Koran Sindo, Pemerintah Terbitkan PP Pengajuan PK, Sabtu, 10 Januari 2015.